

**AKUNTABILITAS DALAM REVITALISASI PENGELOLAAN  
PASAR SMEP KOTA BANDAR LAMPUNG  
(Studi di Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar  
Lampung)**

**Skripsi**

**Oleh:  
AGNESSIA DIKNAS PITALOKA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **AKUNTABILITAS DALAM REVITALISASI PENGELOLAAN PASAR SMEP KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi di Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)**

Oleh :

Agnessia Diknas Pitaloka

Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan kebijakan pembangunan dan penataan kembali Pasar SMEP Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan revitalisasi pasar ini merupakan kewenangan pihak Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan. Mengingat adanya keterbatasan pemerintah akan APBD untuk penyediaan dana pembangunan infrastruktur ini, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan pihak kedua yaitu PT. Prabu Artha. Pembangunan ini telah direncanakan sejak April 2013 dengan target yang ingin dicapai adalah bangunan setinggi 8 lantai. Sejak direncanakan pembangunan pertama hingga saat ini pembangunan kedua Pasar SMEP belum mampu diwujudkan oleh pihak pengembang namun pemerintah masih memberikan kesempatan dan tetap menunjuk PT. Prabu Artha sebagai pengembang untuk menyelesaikan pembangunan Pasar SMEP.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dalam revitalisasi pengelolaan Pasar SMEP oleh Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Metode kualitatif dengan pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung tidak akuntabel dalam revitalisasi pengelolaan Pasar SMEP Kota Bandar Lampung karena pembangunan pasar tidak terlaksana dan tidak sesuai perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Prabu Artha.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Revitalisasi, *Good Governance*.

## ABSTRACT

### **ACCOUNTABILITY OF PASAR SMEP BANDAR LAMPUNG REVITALIZATION ( STUDY IN BIDANG BINA PASAR DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG)**

By :

Agnessia Diknas Pitaloka

Government of Bandar Lampung decide policies on construction and reorganization of Pasar SMEP Bandar Lampung. Market revitalization is a right of Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan. Because of budget limitation, Government of Bandar Lampung cooperated with the second holder, PT. Prabu artha. Construction of Pasar SMEP was planned since April 2013 by targeting 8 floors building. Since planned until now, construction and reorganization of Pasar SMEP has not been able to be realized by the developer but the government still gives opportunity to PT. Prabu Artha to complete market development Pasar SMEP.

The aim of this research is to find out accountability for revitalization of Pasar Smep which is handled by Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. The research uses interview, observation, and documentation to collect the data and the data is analyzed qualitatively. The result of this research shows that Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung is not accountable for revitalization of Pasar Smep Bandar Lampung because the construction did not realize and differed with cooperation agreement between Government of Bandar Lampung and PT. Prabu Artha.

**Key words:** *Accountability, Revitalization, Good Governance.*

**AKUNTABILITAS DALAM REVITALISASI PENGELOLAAN  
PASAR SMEP KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Studi di Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar  
Lampung)**

**Oleh:**

**AGNESSIA DIKNAS PITALOKA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2017**

**Judul Skripsi : AKUNTABILITAS DALAM REVITALISASI  
PENGELOLAAN PASAR SMEP KOTA  
BANDAR LAMPUNG (Studi di Bidang  
Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota  
Bandar Lampung)**

**Nama Mahasiswa : Agnessia Diknas Pitaloka**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1316021008**

**Jurusan : Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**  
NIP 19580109 198603 1 002

**Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.**  
NIP 19830727 200912 1 009

**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.**  
NIP 19611218 198902 1 001

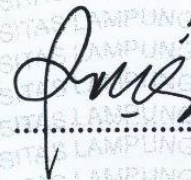
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**



**Sekretaris : Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.**

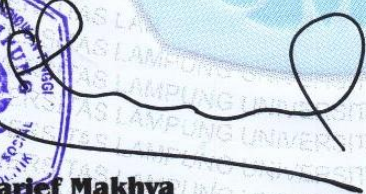


**Penguji Utama : Drs. Feni Rosalia, M.Si.**

**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Syarif Makhya**  
**NIP 19590803 198603 1 003**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juni 2017**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Juni 2017  
Yang Membuat Pernyataan,



Agnessia Diknas Pitaloka  
NPM. 1316021008

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Agnessia Diknas Pitaloka, penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada Tanggal 02 Mei 1995. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Rasilan dan Ibu Jumiati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Kemala Bhayangkara yang diselesaikan pada tahun 2001, SD Kartika II-5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007, SMPN 1 Bendo Magetan, Jawa Timur tahun yang diselesaikan pada tahun 2010, dan SMA AL-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada tahun 2016 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedung Rejosakti Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang selama 60 hari.



## **MOTTO**

Allah tidak pernah mengujimu untuk menghancurkanmu. Ketika Ia mengambil sesuatu darimu, tujuan-Nya untuk memberimu hadiah yang lebih besar lagi.

(Ibnu Qayyim)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS: Asy-Syarah : 5)

Kau tak akan pernah mampu menyebrangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan

(Christopher Colombus)

Jika anda tidak menanggung rasa sulit dan mencoba yang paling sulit anda tidak akan pernah mencapai keberhasilan sejati

Untuk mendapatkan sebuah kesuksesan, keberanianmu harus jauh lebih besar daripada ketakutanmu

(Agnessia Diknas Pitaloka)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,  
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW  
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada

Keluargaku

Kedua Orangtua Ayahandaku Rasilan dan Ibundaku Jumiati  
Adik-adikku Dewan Aldino Ramadhan dan Khafa Riski Ramadhan  
Terimakasih Untuk Seluruh Kasih Sayang dan Semua Rasa Kepercayaan  
Sehingga Membuat Diriku Menjadi Orang yang Berani dan Jujur Sehingga  
Menjadi Orang yang Sukses

Kepada Sahabat

Terima Kasih Telah Memberikan Dorongan, Semangat, dan Kasih Sayang Sampai  
Diriku Menjadi Pribadi yang Sukses

Kepada Calon Imamku Kelak

Terima Kasih Selalu Memberikan Motivasi dan Kasih Sayang yang Membuat Ku  
Yakin Untuk Terus Berkarya dan Melaju Ke Arah yang Lebih Baik

Kepada saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Semoga Amal Kebaikan yang Telah Dilakukan Mendapat Balasan dari Allah  
SWT.

Serta

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobil'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya dari Allah SWT Tuhan Semesta Alam Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Akuntabilitas dalam Revitalisasi Pengelolaan Pasar SMEP Kota Bandar Lampung (Studi di Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritiknya yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama ini dalam perkuliahan.

2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya, sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Himawan Indrajat S.IP M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Teristimewa untuk kedua Orang tuaku: Ayahanda Rasilan. dan Ibunda Jumiati, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga Pipit dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk Bapak dan Ibu.
8. Adik-adikku: Dewan Aldino Ramadhan dan Khafa Riski Ramadhan terima kasih untuk keberadaan kalian yang selalu memotivasi mba untuk segera

menyelesaikan *study*. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua.

9. Seluruh keluarga besar Kakung Asmo Sugiman dan Mamak Semi: keluarga Bulek Lastri, keluarga Paklek Yono, dan keluarga Paklek Totok yang telah memberikan doa dan semangat selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga Pipit dapat membanggakan untuk keluarga.
10. *My Best Partner*, Mohammad Ichwan, seseorang yang namanya selalu kuselipkan di dalam doa. Terima kasih atas kebaikan, kesabaran, perhatian, kasih sayang, dan dukungan dalam bentuk apapun, selama ini.
11. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang membuat masa perkuliahan menjadi penuh sukacita: Ipnika Nurfasari S.I.P., Nadia Maudyna Eldarini S.I.P., Risky Nitha Islamiyati S.I.P., yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas waktu, bantuan, semangat, dan dukungannya selama ini.
12. Kakak-kakak tingkatku Bang Melyansyah S.I.P., Mba Winda Dwi Astuti Herman S.I.P., dan Mba Rina Septiana S.Pd. yang telah membagikan ilmunya serta memberikan saran demi terciptanya skripsi ini.
13. Angkatan 2013 teman bagaikan saudara seperjuangan di ilmu pemerintahan: Rifky Febrihanuddin S.I.P., Raindi Zikri, S.I.P., Ibnu Fadhil S.I.P., Chici Afrianita, S.I.P., Putri Aphrodite, S.I.P., Defa Septia, S.I.P., Oca Pawalin, S.I.P., Rini Setiawati, S.I.P., Maria Christina, S.I.P., Tiara Dhayu, S.I.P., Aziza Aulia Fahmi, S.I.P., Citra Ayu Narulita, S.I.P., Ekasyari Yulianita, S.I.P., Vivi Alvionita, S.I.P., Restiani Damayanti, S.I.P., Fina Ria Tisa, S.I.P., Kenn Sindy, S.I.P., Marina Syva, S.I.P., Hesti

Seftia, S.I.P., Ika Khodijah, S.I.P, Lusita, S.I.P, Riki Mahdalena S.I.P., Syaidina Iskandar Malik S.I.P., Novriko Dwi Sanjaya, S.I.P., Novrizal Fahmi S.I.P., Agung Rahmat S.I.P., terima kasih untuk waktu dan kebersamaan yang pernah mengisi keseharian penulis, semoga silaturahmi kita akan terus tetap terjalin dalam acara jalinan kasih.

14. Sahabat-sahabatku sejak dibangku SMA: Novalia Rosa, Sylvia Dwitara S.H., Farah Atikah, S.Pd., Fepti Triwulandari S.Pd., Diah Putri S.E., Siti Rohmatul Fajriah S.E., Namira Handayani Amd.kep., Firyal Gholiyah S.Pd. terimakasih untuk kebersamaan dan menjadi sahabat terbaik selama 7 tahun ini, semoga kita tetap bisa seperti ini sampai tua sampai punya cucu dan cicit bersama. Love you!
15. Seluruh teman-teman Angkatan 2013 terimakasih atas dukungan, kepercayaan dan semangat yang telah diberikan.
16. Teman-teman KKN desa Gedung Rejosakti: Yosela, Dian, Nurullia, Siti Sarah, Yosef, dan Wawan terimakasih untuk kebersamaan selama dua bulan, serta dukungan dan Doanya selama ini.
17. Adikku angkatan 2014 Tiara Herina terimakasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.
18. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, banyak ilmu, banyak teman dan banyak sahabat sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan bangsaku.
19. Serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung

Penulis

**Agnessia Diknas Pitaloka**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Good Governance .....	11
B. Akuntabilitas .....	13
1. Prinsip Akuntabilitas .....	16
2. Jenis-jenis Akuntabilitas .....	17
3. Dimensi Akuntabilitas .....	18
C. Kebijakan Publik.....	20
D. Pembangunan.....	22
1. Pembangunan Infrastruktur.....	23
E. Revitalisasi Pasar .....	26
F. Kerangka Pikir Penelitian .....	28
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	32
B. Fokus Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian .....	35
D. Informan.....	36
E. Jenis Data.....	37
1. Data Primer .....	37
2. Data Sekunder.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
1. Observasi .....	39
2. Wawancara .....	40
3. Dokumentasi .....	41
G. Teknik Pengolahan Data .....	42
1. Seleksi Data .....	43
2. Klarifikasi Data.....	43



3. Mengumpulkan Hasil.....	43
H. Teknik Analisis Data .....	44
1. Reduksi Data .....	44
2. Display Data .....	45
3. Verifikasi Data .....	45
4. Triangulasi Data .....	46
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Pasar SMEP .....	48
B. Letak Pasar SMEP .....	49
C. Komposisi Pedagang .....	49
D. Gambaran Umum Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan .....	50
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Akuntabilitas Kejujuran .....	58
B. Akuntabilitas Hukum .....	63
C. Akuntabilitas Proses .....	68
D. Akuntabilitas Program .....	77
E. Akuntabilitas Kebijakan .....	80
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	86
B. Saran .....	89

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu.....	6
2. Jumlah Pedagang Pasar SMEP .....	50
3. Triangulasi Data Penelitian.....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir .....	31
2. Pasal 3 isi Perjanjian kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Prabu Artha .....	66
3. Kerja Sama antar Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Prabu Arta.....	72

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sejatinya merupakan proses perubahan berencana yang dilakukan menuju kondisi yang lebih baik dan direalisasikan dengan berbagai aktivitas dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan kebijakan pembangunan dan penataan kembali Pasar SMEP Kota Bandar Lampung sebagai bentuk fungsi pemerintah dalam hal pembangunan. Fungsi pembangunan ini dimaksudkan untuk keadaan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera baik secara fisik maupun mental.

Kondisi pasar yang dianggap sudah tidak layak pakai serta fungsi pasar tidak optimal sebagai akibat dari kondisi bangunan yang sudah tidak layak lagi, sehingga dikhawatirkan bangunan tersebut dapat membahayakan keselamatan para pedagang dan pembeli sehingga Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat kebijakan pembangunan dan penataan kembali Pasar SMEP Kota Bandar Lampung. Hal ini juga dikarenakan melihat kondisi Pasar SMEP yang semakin padat oleh para pedagang sebagai akibat dari adanya peningkatan jumlah penduduk yang menjalankan aktivitas disektor perdagangan, menyebabkan areal pasar ini tidak lagi mampu menampung pedagang (*over capacity*).

Berdasarkan Jurnal Progres, Fakultas Ilmu Sosiasl dan Ilmu Politik Universitas Tulang Bawang Lampung, Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung (Mardihantoro dan Metty, 2016 : 3):

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung membuat kebijakan untuk revitalisasi pasar-pasar tradisional. Konsepnya adalah melakukan penataan dengan membuat pasar-pasar tradisional menjadi pasar yang lebih layak dan nyaman untuk dikunjungi pengunjung. Dalam konteks penataan pasar Pemkot Bandar Lampung menugaskan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung (Dinas Pasar).

Dinas tersebut adalah dinas teknis yang melaksanakan tugas mengelola penerimaan retribusi di bidang perpasaran yang merupakan sumber dari APBD kota Bandar Lampung. Dinas Pasar juga merupakan unsur pelaksana Pemkot Bandar Lampung penyelenggara kewenangan Pemerintah Daerah Kota di bidang pengelolaan pasar. Penataan berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku serta melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pelaksanaan revitalisasi pasar merupakan kewenangan pihak Dinas Pengelolaan Pasar sebagai kepanjangan tangan Walikota sebagi pengambil kebijakan publik tentang penataan pasar serta bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kota. Dinas Pengelolaan Pasar saat ini telah dihapus dan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengubahnya menjadi perusahaan daerah (PD).

Penghapusan tersebut mengikuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah.

Saat ini Bandar Lampung telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Pasar. Segala urusan Dinas Pengelolaan Pasar terdahulu diwariskan kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandar Lampung. Berkaitan dengan baru dibentuknya Perusahaan Daerah Pasar sehingga belum operasionalnya pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga kebijakan pembangunan dan penataan kembali Pasar SMEP dilimpahkan kepada Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan yang diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Bandar Lampung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Sebelumnya lokasi Pasar SMEP yang merupakan aset daerah ini merupakan sebuah sekolah yaitu Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP). Adanya sebuah sekolah maka membuka peluang juga kepada pedagang untuk mencari nafkah sehingga pedagang mulai berdagang di sekitaran sekolah tersebut. Berjalannya waktu semakin banyak pula pedagang yang berjualan di lokasi tersebut. Melihat fenomena tersebut maka pemerintah membuat sebuah kebijakan yaitu menjadikan lokasi tersebut menjadi sebuah pasar tradisional dengan nama Pasar SMEP.

Mengingat adanya keterbatasan pemerintah dalam APBN maupun APBD untuk penyediaan dana pembangunan infrastruktur ini, maka dituntut adanya model-model baru pembiayaan proyek pembangunan. Pengadaan

infrastruktur di daerah dilakukan sebagai alternatif pendanaan dengan melibatkan pihak swasta (nasional-asing) dalam proyek-proyeknya. Salah satu upaya Pemerintah Kota yaitu dengan melibatkan pihak kedua yang siap menjadi investor untuk mengembangkan pasar tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan PT. Prabu Artha sebagai pemenang tender.

Menurut Ariwibowo (2015) dalam skripsi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung Dengan PT. Prabu Artha Developer (Studi Pada Perjanjian Pembangunan dan Penataan Kembali Pasar SMEP Kota Bandar Lampung ) :

1. Hubungan kontraktual antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Prabu Artha Developer didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Pembangunan Dan Penataan Kembali Pasar SMEP Sukajawa Baru Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Para pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tersebut kemudian menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Bentuk dari perjanjian ini dibuat dengan pola *Build Operate and Transfer* (BOT) atau Perjanjian Bangun Guna Serah.
2. Dalam Perjanjian Bangun Guna Serah, Pemanfaatan tanah/atau bangunan milik Pemerintah Daerah oleh Pihak PT Prabu Artha Developer untuk di bangun bangunan Pasar Tradisional Modern SMEP Bandar Lampung siap pakai dan/atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan/atau bangunan tersebut, dan mempergunakannya selama kurun waktu 30 tahun untuk kemudian setelah jangka waktu berakhir menyerahkannya kembali tanah dan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitas tersebut kepada Pemerintah Daerah.

Pembangunan Pasar SMEP direncanakan sejak April 2013, target yang ingin dicapai adalah bangunan setinggi 8 lantai. Bangunan tersebut akan diserahkan kepada pihak pengembang untuk membangun dengan jangka waktu 3 tahun. (Sumber: edisi <http://lampung.tribunnews.com> Minggu, 9 Oktober 2016 20:15 diakses pada 10 Desember pukul 22.05)

Pembangunan pasar yang hingga kini belum teralisasi membuat para pedagang resah, pasalnya pedagang khawatir uang setoran yang telah mereka bayar sebagai uang muka mendapatkan kios, raib bersama bos PT. Prabu Artha Ferry Soelishio. Berdasarkan laporan asosiasi pedagang, jumlah pedagang yang sudah menyetorkan uang ke PT. Prabu Artha mencapai 420 lebih pedagang. Dengan total uang yang dibayar mencapai Rp 10 miliar (Sumber: <http://lampung.tribunnews.com> edisi Senin, 15 September 2014 14:56 diakses pada 10 Desember 2016 pukul 11.00).

Berdasarkan permasalahan di atas timbul pertanyaan bagaimana upaya Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan sebagai otoritas perumusan kebijakan teknis meliputi pembangunan sarana prasarana dalam pembangunan dan penataan kembali Pasar SMEP. Sedangkan PT. Prabu Artha sebagai pengembang pembangunan Pasar SMEP. PT. Prabu Artha terbukti tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah ditetapkan dan lepas dari tanggung jawabnya dalam penyelesaian proyek pembangunan selama 3 tahun terakhir ini.

Fungsi pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan penataan kembali Pasar SMEP Kota Bandar dinilai berhasil jika Pemerintah mampu merevitalisasi pasar sesuai visi dan misi serta menyelesaikannya tepat pada waktu yang ditetapkan. Implementasi kebijakan pembangunan dan penataan kembali Pasar SMEP Kota Bandar Lampung ini dapat mencerminkan masih kurang baiknya penerapan *good governance* (pemerintahan yang baik) dalam Pemerintahan Kota Bandar Lampung.



Pemerintahan yang baik dapat diwujudkan melalui prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah persyaratan kunci dalam pencapaian *good governance*, dimana tidak hanya berlaku dalam institusi pemerintah, tetapi juga sektor privat dan organisasi dari masyarakat sipil dituntut untuk akuntabel ke publik dan *stakeholder* lainnya. Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan harus akuntabel dalam implementasi kebijakan pembangunan dan penataan kembali Pasar SMEP Kota Bandar Lampung sebagai unsur pelaksana Pemkot Bandar Lampung dan penyelenggara kewenangan Pemerintah Daerah Kota dibidang pengelolaan pasar.

Berdasarkan dengan penelitian ini maka peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut penelitian terdahulu pernah dilakukan peneliti sajikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No (1)	Peneliti (2)	Tahun (3)	Jenis (4)	Judul Penelitian (5)	Hasil Penelitian (6)
1	Hutagaol,  Jona	2014	Skripsi	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Desa Riau Periang Kecamatan Pobian, Kabupaten Lampung Selatan)	Pertanggungjawaban administrasi keuangan dalam pengelolaan program ADD (Alokasi Dana Desa) terkendala oleh kompetensi SDM.
2	Kurniaty,  Novita	2014	Skripsi	Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Implementasi Kebijakan	Renovasi dan pembangunan Pasar SMEP yang direncanakan oleh Pemerintah Kota

No (1)	Peneliti (2)	Tahun (3)	Jenis (4)	Judul Penelitian (5)	Hasil Penelitian (6)
				Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar SMEP Bandar Lampung	Bandar Lampung dengan melibatkan pihak pengembang PT. Prabu Artha tidak berhasil, pedagang tidak bersedia direlokasi karena lokasi yang ditempati pedagang memang tidak memadai, dan masih kurangnya sumber daya yang diperlukan dalam suatu kebijakan seperti biaya, fasilitas, informasi dan dana.
3	Ariwibowo, Bramantya	2015	Skripsi	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung Dengan PT Prabu Artha Developer (Studi Pada Perjanjian Pembangunan Dan Penataan Kembali Pasar SMEP Bandar Lampung)	Bentuk dari perjanjian ini dibuat dengan pola <i>Build Operate and Transfer</i> (BOT) atau Perjanjian Bangun Guna Serah. Dalam Perjanjian Bangun Guna Serah, Pemanfaatan tanah/atau bangunan milik Pemerintah Daerah oleh Pihak PT Prabu Artha Developer untuk di bangun bangunan Pasar Tradisional Modern SMEP Bandar Lampung siap pakai dan/atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan/atau bangunan.

Sumber: Diolah Peneliti (2017)

Penelitian pertama difokuskan pada akuntabilitas Alokasi Dana Daerah Desa Riau Periang dalam pembangunan fisik untuk mewujudkan akuntabilitas berdasarkan akuntabilitas kepemimpinan, akuntabilitas proses,

akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Penelitian kedua difokuskan pada implementasi kebijakan pengelolaan PKL. Penelitian ketiga difokuskan pada hubungan kontraktual yang terjadi antara PT Prabu Artha Developer dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam perjanjian perjanjian kerja sama pembangunan dan penataan kembali Pasar SMEP Bandar Lampung.

Penelitian saat ini difokuskan pada sejauh mana tingkat pertanggungjawaban Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan yang dilihat dari konsep pemerintahan yang baik selama revitalisasi Pasar SMEP Kota Bandar Lampung. Penelitian yang dilakukan akan mengkaji permasalahan revitalisasi pasar SMEP Kota Bandar Lampung dengan fokus mengetahui akuntabilitas dalam revitalisasi pengelolaan Pasar SMEP oleh Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Akuntabilitas tersebut dilihat dengan indikator dimensi-dimensi akuntabilitas menurut Ellwood berupa akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas prosedur dan akuntabilitas kebijakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, setelah akuntabilitas diketahui, maka akan menunjukkan sejauhmana Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan atas pelaksanaan revitalisasi Pasar SMEP. Disinilah titik perbedaan ini dengan penelitian tersebut di atas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah akuntabilitas dalam revitalisasi pengelolaan Pasar SMEP oleh Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dalam revitalisasi pengelolaan Pasar SMEP oleh Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Sebagai sarana untuk pengembangan teori-teori di bidang ilmu pemerintahan terutama dalam teori pembangunan, kebijakan publik dan *Good Governance*. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mampu memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

### **2. Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan sumbangan pemikiran tentang pengambilan kebijakan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan, Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandar Lampung, serta

memberikan solusi bagi para pedagang Pasar SMEP Kota Bandar Lampung, terkait dengan akuntabilitas dalam revitalisasi pengelolaan Pasar SMEP oleh Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Good Governance

*Good governance* mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu menurut posisi pelayanan *Good Governance* kepada masyarakat akan terlihat seperti mempercepat pekerjaan pelayanan, mempermudah biaya pelayanan, dan memperbaiki mutu pelayanan (Syafiie, (2011:158-159).

*Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *good governance* (pemerintahan yang baik) (Sedarmayanti, 2012:2). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, amat dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi dan integritas, professional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

*Good governance* juga sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat Berdasarkan hal tersebut berikut terdapat 4 prinsip utama dalam pelaksanaan *good governance* yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, sebagai berikut (Sedarmayanti, 2009:284):

1. Akuntabilitas, berupa pertanggungjawaban politik yakni adanya mekanisme penggantian pejabat atau penguasa secara berkala tidak ada usaha membangun monoloyalitas secara sistematis dan adanya definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan di bawah kerangka penegakkan hukum.  
Pertanggungjawaban publik yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan.
2. Transparansi (keterbukaan), dapat dilihat dari 3 aspek: (1) adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, (2) adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, (3) berlakunya prinsip *check and balance*, antar lembaga eksekutif dan legislatif.
3. Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, hal seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
4. Supremasi hukum aparat birokrasi, berarti ada kejelasan dan prediktabilitas birokrasi terhadap sektor swasta, dan dari segi masyarakat sipil berarti ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak warga negara dalam menegakkan pertanggungjawaban pemerintah.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi

pemerintah seperti halnya penelitian yang akan diteliti ini berkaitan dengan akuntabilitas dalam revitalisasi pengelolaan Pasar SMEP oleh Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Segi fungsional aspek *good governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintah tidak berfungsi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas publik dan penerapan prinsip – prinsip *good governance* menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Berawal dari konsep akuntabilitas, maka penyediaan informasi yang relevan menggambarkan kinerja (*performance*) sektor publik sangat penting dalam memberikan pertanggungjawaban akan segala aktivitasnya kepada semua pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas mendukung terlaksananya pemerintahan yang demokratis sehingga masyarakat memiliki kepercayaan bahwa pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui reformasi sistem, program, maupun aktivitas pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan kesadaran akan akuntabilitas dan prinsip – prinsip *good governance*, pemerintah mulai mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik menuju *good governance*.

## **B. Akuntabilitas**

Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya



secara transparan kepada masyarakat sebagai suatu proses pemberian pertanggungjawaban dan memberi jawaban. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis.

Akuntabilitas merupakan prinsip dasar dari pertanggungjawaban kinerja secara wajar dan transparan akuntabilitas merupakan syarat untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas juga merupakan penerapan prinsip keterbukaan, sebab dengan adanya keterbukaan yang dapat diimplementasikan dalam bentuk laporan berkala dan pengawasan langsung dari pihak kreditor dalam mengetahui penggunaan dana yang telah dipakai, kepentingan kreditor dapat lebih terjamin (Surya dan Yustiavandana, 2006:87).

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Sedarmayanti, 2012:3). Pendapat lain mengungkapkan akuntabilitas diartikan sebagai berikut:

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber dana publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Serta terkait untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Teguh, 2004:2).

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Dipihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Secara umum akuntabilitas adalah sebagai suatu proses pemberian pertanggungjawaban dan memberi jawaban kepada pihak yang berkepentingan atas tindakan atau kegiatan yang telah dilakukan.

Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai apa yang dikerjakan sebagai wujud konsekuensi dari mandat yang telah diberikan masyarakat, oleh karena itu berarti akuntabilitas menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan. Masyarakat sebagai pemberi mandat dapat memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan kebijakan, apakah pelaksanaan mandat dilakukan secara memuaskan atau tidak. Masyarakat memiliki hak untuk menilai kinerja pelaksana mandat, memberikan masukan, hak untuk *complain*, hak diinformasikan.

## 1. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas publik mengharapkan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses perumusan masalah dan implementasi program. Keterlibatan ini menunjukkan adanya tanggung jawab bersama dalam proses tersebut. Adanya tanggung jawab bersama ini menunjukkan kebersamaan dalam mengatasi berbagai masalah publik dan nilai ini sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program.

Prinsip akuntabilitas merupakan bagaimana suatu unit harus dapat mempertanggungjawabkan hasil dari program pemerintahan yang telah dijalankan dan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan kepada *stakeholdernya*. Prinsip-prinsip laporan akuntabilitas adalah sebagai berikut (Sedarmayanti, 2012:70):

1. Komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
2. Beberapa sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah

Pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas. Prinsip ini menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*). Hal ini berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang

berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

## 2. Jenis-jenis Akuntabilitas

Jenis akuntabilitas dibedakan tiga jenis akuntabilitas publik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan (Brautinggam dalam Widodo, 2001:152) yaitu:

1. Akuntabilitas politik, berkaitan erat dengan sistem pemilu, sistem politik “multi partai” dinilai lebih mampu menjamin akuntabilitas politik pemerintahan terhadap rakyatnya daripada pemerintahan dalam sistem “satu partai”.
2. Akuntabilitas keuangan, berarti aparat pemerintah wajib mempertanggung jawabkan setiap rupiah uang rakyat dalam anggaran belanjannya yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi.
3. Akuntabilitas hukum, bahwa rakyat harus memiliki keyakinan bahwa unit-unit pemerintahan dapat bertanggungjawab secara hukum atas segala tindakannya.

Akuntabilitas politik merupakan gambaran dari sistem demokratis. Menggambarkan pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Akuntabilitas keuangan dimana aparat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan dana publik dengan profesional untuk melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan publik interest atau kepentingan masyarakat. Berdasarkan kategori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan *public goods* dan *public service* yang merupakan tuntutan (*demand*) masyarakat (*costumer*).

### 3. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (Ellwood dalam Mardiasmo, 2005:21) yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum  
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang, akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses  
Terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas Program  
Terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah dipertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan  
Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap masyarakat luas

Dimensi akuntabilitas diatas peneliti gunakan untuk menjawab hasil dari penelitian ini. Untuk menilai dari segi pertanggungjawaban seorang pemimpin dapat diukur melalui akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan sehingga dapat memudahkan penulis untuk mengukur akuntabilitas dalam revitalisasi pengelolaan Pasar SMEP oleh Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Akuntabilitas kejujuran merupakan bagian dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Akuntabilitas hukum merupakan kesanggupan untuk mentaati segala peraturan perundang undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah dipertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas kebijakan mengacu pada pertanggungjawaban pemerintah dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.

Berdasarkan dimensi akuntabilitas di atas, peneliti akan menggunakan dimensi akuntabilitas tersebut dalam menyelesaikan penelitian. Menurut peneliti dimensi akuntabilitas cukup relevan untuk digunakan dalam penyelesaian masalah dalam penelitian ini. Hal tersebut sesuai dengan masalah yang ada selama revitalisasi Pasar SMEP ini.

### C. Kebijakan Publik

Kehidupan *modern* seperti sekarang ini, kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan publik kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, perumahan rakyat, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri dan lain sebagainya. Berdasarkan sisi *government* kebijakan lebih diperhatikan sebagai pengelola program pemerintahan. Hal ini karena dalam proses implementasinya haruslah memiliki arah tujuan yang benar-benar jelas, hal tersebut tidak lain untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan yang ada.

Terdapat ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional, 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2004:158-160).

Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-

keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Dunn, 2003:132). Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan.

Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan macam definisi tentang kebijakan yang telah dikemukakan di atas maka yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam penelitian ini adalah sekumpulan keputusan, tindakan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sebagai wujud akuntabilitas publik, jaringan implementasi kebijakan publik merupakan suatu wadah yang menghimpun semua pemangku kepentingan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan untuk menjelaskan pemanfaatan sumber-sumber daya secara bersama sehingga tujuan dapat dicapai dengan efisien, efektif, dan demokratis.

Akuntabilitas publik yang demokratis mengharapkan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses perumusan masalah dan implementasi program. Keterlibatan ini menunjukkan adanya tanggung jawab bersama



dalam proses tersebut untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program. Pemerintahan negara/daerah perlu menyelenggarakan amanah rakyat dengan efektif dan efisien. Penyelenggaraan yang demikian ini memerlukan adanya jaringan antar organisasi berbagai pemangku kepentingan terutama pemanfaatan bersama sumber-sumber daya dalam proses perumusan masalah dan implementasi program.

#### **D. Pembangunan**

Pembangunan itu merupakan upaya peningkatan nilai sumber daya, dalam pembangunan memerlukan perencanaan pembangunan sebagai alat untuk mendorong dan mengendalikan proses pembangunan secara keseluruhan. Pembangunan juga sebagai proses perubahan yang terencana dari situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi, dengan kata lain pembangunan menyangkut proses perbaikan (Moeljarto, 1995: 3)

Proses pembangunan yang baik berguna atas beberapa alasan (Ulrich and Eppinger 2012:12) yaitu:

1. Jaminan kualitas proses pembangunan menspesifikasikan fase-fase proyek pembangunan melalui bagian penting. Ketika fase dan bagian penting dipilih dengan baik maka proses pembangunan yaitu salah satu cara untuk meyakinkan kualitas dari produk yang menghasilkan.
2. Koordinasi, proses pembangunan yang jelas bertindak sebagai rencana besar yang mendefinisakan peran dari setiap pelaksana tim pembangunan..
3. Perencanaan, proses pembangunan termasuk langkah yang berpengaruh terhadap penyelesaian setiap fase.
4. Manajemen, proses pembangunan standar untuk menilai pencapaian dari usaha pembangunan yang sedang berjalan..

5. Perbaikan, dokumentasi dan peninjauan yang teliti dari sebuah proses pembangunan organisasi dan produknya dapat membantu mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan.

Pembangunan terkandung arti adanya suatu usaha untuk mengembangkan, memperbaharui, mengganti yang tidak atau kurang baik dengan yang baik, membuat yang baik lebih baik, yang sudah baik diusahakan agar semakin baik. Pengertian pembangunan tersebut terkandung pula arti dari adanya suatu usaha agar benar-benar lebih maju, lebih modern, usaha untuk maj terus dengan modernisasi dan pembaharuan. Problem mendasar bagi suatu bangsa atau negara dalam pembangunan adalah mencari wujud kondisi masyarakat secara ideal dan bagaimana cara merealisasikannya. Berdasarkan proses pembangunan, pelaku pembangunan seringkali menentukan standar keberhasilan dari aktifitas pembangunan untuk mencapai *goal of development*.

### **1. Pembangunan Infrastruktur**

Perbaikan infrastruktur memiliki kontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi.

Infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh *public* untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan

pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Infrastruktur juga memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. (Kodoatie, 2005: 34).

Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara sistem sosial dan sistem ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan. Tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi (Todaro, 2006: 26).

The World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sector transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.
3. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, control administrasi dan koordinasi.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaannya diatur pemerintah, yaitu: infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur tersebut diatas dapat dikategorikan

sebagai infrastruktur dasar, karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah.

Pembangunan infrastruktur mampu menopang ekonomi nasional dari berbagai sisi. Melalui pengeluaran pemerintah untuk berbagai proyek konstruksi, pembangunan infrastruktur telah membuka jutaan lapangan kerja sekaligus ribuan transaksi bisnis, mulai dari kegiatan konstruksi sederhana hingga konstruksi berteknologi tinggi (Susantono, 2009:6). Pembangunan infrastruktur pada umumnya program ditargetkan pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia. Ketersediaan infrastruktur yang memadai tentunya akan memudahkan segala mobilitas manusia dalam berkehidupan. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa infrastruktur sebagai sistem yang dikaitkan dengan unsur yang berada di dalam suatu sistem ruang dan kegiatan, memiliki peran penting terhadap perubahan kemakmuran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Peran infrastruktur terhadap perkembangan wilayah dan kota memiliki kontribusi yang sangat signifikan, baik pada aspek perekonomian, sosial-kemasyarakatan, maupun kelestarian lingkungan. Akan tetapi arah kebijakan pembangunan sistem infrastruktur yang berlangsung saat ini belum menunjukkan hasil yang memadai untuk memerankan fungsinya sebagai pengarah dan pendorong pembangunan

## **E. Revitalisasi Pasar**

Pembangunan secara umum berarti perbaikan disemua sektor, salah satunya adalah pembangunan dibidang ekonomi yaitu pembangunan pasar. Pentingnya pembangunan pasar karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan pasar telah menjadi penopang utama perekonomian di suatu daerah. Menurut jenisnya, pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Fakta yang terjadi sekarang adalah terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara keduanya. Secara fisik, pasar tradisional dianggap lebih kumuh dari pasar modern. Hal tersebut akan berdampak pada eksistensi pasar tradisional jika tidak diperhatikan, karena jumlah pasar modern yang diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya.

Salah satu strategi dari adanya fenomena tersebut adalah dilaksanakannya kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Namun demikian, revitalisasi pasar tidak otomatis mendorong peningkatan pembeli. Bahkan dalam jangka pendek, revitalisasi pasar membuat orang kehilangan pelanggan karena untuk sementara pasar dilakukan penataan. Untuk itu dibutuhkan proses pemulihan untuk menarik kembali pelanggan pasar yang lama.

Pasar adalah suatu tempat terwujud dalam fisik yang mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang. Secara umum pasar dibedakan atas pasar tradisional dan pasar moder (Sukirno, 2003:25). Pasar pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan pelayanan keada masyarakat agar bisa memenuhi berbagai keinginan yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup sehari-hari. Kegiatan pasar berarti melibatkan masyarakat baik selaku

pembeli maupun penjual yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh sebab itu pasar memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu cara merevitalisasi yaitu menciptakan pasar tradisional dengan berbagai fungsi dan kegunaan, seperti tempat bersantai atau tempat rekreasi bersama dengan keluarga. Revitalisasi pasar tradisional bertujuan meningkatkan pasar tradisional agar tetap bisa bersaing dengan pasar modern.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) revitalisasi merupakan proses, cara dan perbuatan memvitalkan (menjadi vital). Sedangkan vital sendiri mempunyai arti penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Fokus utamanya pada struktur manajemen yang harus dikelola dengan baik oleh aktor yang berkompeten, serta polanya mengikuti perubahan-perubahan, sehingga benar jika konsep revitalisasi mengacu pada program pembangunan.

Fungsi pembangunan pasar juga diharapkan tidak hanya mencari keuntungan finansial dan merupakan langkah untuk meningkatkan perekonomian perdagangan kecil serta perlu melibatkan pengembang untuk dikelola secara kreatif. Keberadaan pasar, khususnya yang tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Renovasi dan inovasi menjadi kunci untuk memunculkan kembali jati diri pasar tradisional jika tidak mau menjadi sejarah dan terlupakan.

Masalah infrastruktur ditengarai masih menjadi permasalahan yang dinilai serius di pasar tradisional ialah dimana bangunan pasar yang kondisinya

sudah lama, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang keberadaannya kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, dan buruknya sirkulasi udara. Penataan dan revitalisasi pasar tradisional, menjadi upaya dimana agar pasar tradisional tidak terkesan kumuh, serta masyarakat lebih tertarik pada pasar tradisional. Selain hal tersebut, dalam menjalankan kebijakan revitalisasi terhadap pasar-pasar tradisional harus tepat sasaran.

Revitalisasi pasar tradisional seharusnya dapat dilakukan dengan menata dan membenahi pasar tradisional, dimana kelemahan-kelemahan pada pasar tradisional yang menyebabkan penurunan daya saing pasar tradisional sendiri harus segera dibenahi. Revitalisasi pasar tradisional membutuhkan kebijakan yang berpihak, baik pemerintah maupun seluruh *stakeholder* yang terkait. Hal utama dalam menjalankan proses revitalisasi pasar tradisional adalah kebijakan pemerintah daerah yang harus didukung juga oleh DPRD setempat. Dalam meningkatkan peran pasar tradisional pada proses berjalannya ekonomi masyarakat bawah perlu adanya keseriusan tentang kebutuhan *riil* masyarakat pada daerah tersebut.

#### **F. Kerangka Pikir Penelitian**

*Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. *Good governance* juga merupakan pengelolaan kekuasaan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, serta

pertanggungjawaban kepada masyarakat. *Good governance* dapat diwujudkan melalui akuntabilitas.

Berdasarkan dengan masalah akuntabilitas dalam revitalisasi pengelolaan Pasar SMEP oleh Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, meninjau dari segala tindak tanduk Bidang Bina Pasar dalam menjalankan kewenangan pengelolaan Pasar SMEP, berdasarkan pendapat Ellwod di atas dalam penelitian ini dimensi–dimensi akuntabilitas ini cukup relevan dalam membahas permasalahan penelitian ini.

Berdasarkan dari sudut pandang pertanggungjawaban dalam revitalisasi pengelolaan Pasar SMEP oleh Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dilihat akuntabel diantaranya sebagai berikut:

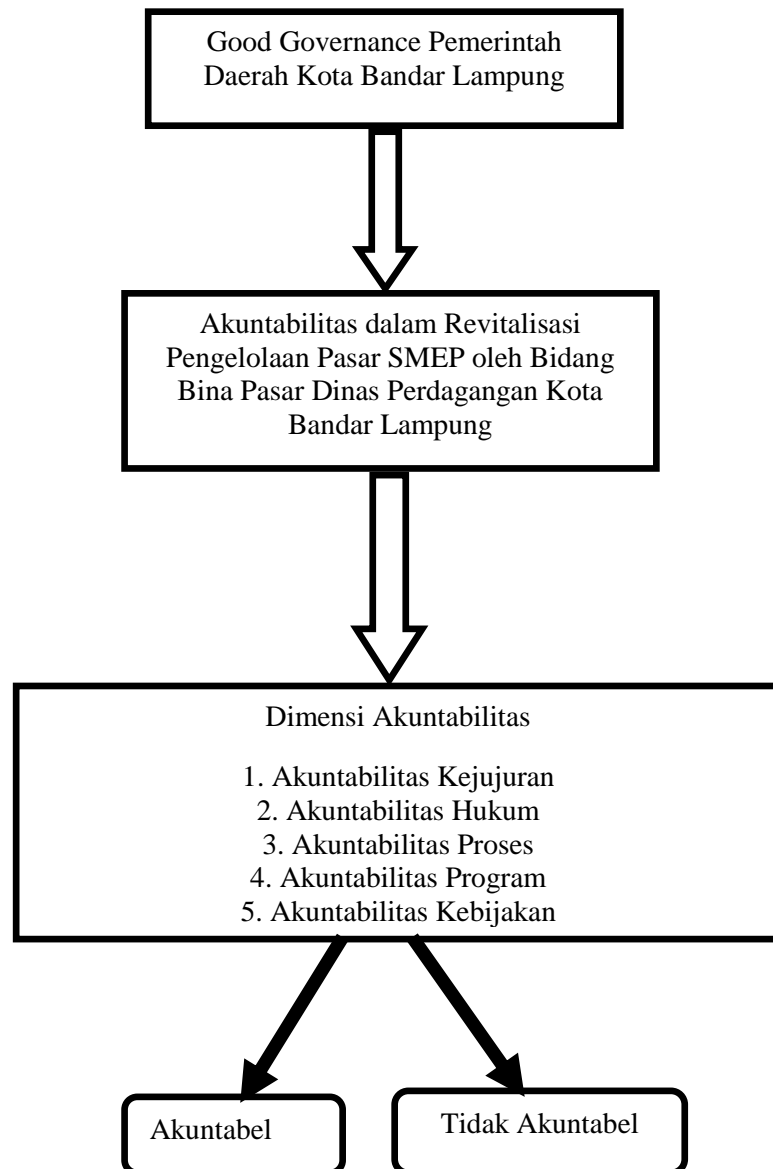
1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada sasaran
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional
4. Mampu memberikan ruang bag masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan
5. Adanya saran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah.

Bidang Bina Pasar dinilai tidak akuntabel dalam proses pelaksanaan pembangunan, jika Bidang Bina Pasar tidak menerapkan nilai-nilai



akuntabilitas, sehingga tidak berorientasi pada kesejahteraan pedagang. Oleh karena itu, dimensi akuntabilitas dapat dijadikan konsep untuk membahas dari segi penelitian yang berhubungan dengan akuntabilitas karena terkait dengan kepatuhan terhadap hukum ,pertanggungjawaban penggunaan sumber dana publik terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, terkait dengan program yang dilaksanakan dan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat dan daerah atas kebijakan- kebijakan yang diambil pemerintah terhadap masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui akuntabilitas dalam revitalisasi pengelolaan Pasar SMEP oleh Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Jika indikator akuntabilitas telah diterapkan maka Bidang Bina Pasar telah berupaya mewujudkan akuntabilitas dalam revitalisasi Pasar SMEP. Dengan demikian maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan peneliti dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian pada prinsipnya sama dengan mengungkapkan unsur-unsur pengumpulan data, analisis, dan upaya pengembangan suatu bidang ilmu atau solusi suatu permasalahan. Sebagaimana definisi penelitian menurut T. Hillway, *Introduction to Research* 1956, penelitian adalah suatu metode yang dilakukan melalui penyelidikan yang hati-hati terhadap suatu masalah agar diperoleh pemecahan masalah yang tepat. Pembahasan dimulai dengan menentukan tipe penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data (Silaen, 2013:15 ).

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Konteks penelitian kualitatif, unsur utama sebagai isi dari rancangan penelitian pada umumnya adalah konteks penelitian, fokus kajian, tujuan penelitian, ruang lingkup, perspektif kajian teoritik dan kajian pustaka, serta metode yang digunakan (Bungin, 2012:239).

Metode kualitatif memiliki cirri-ciri (Usman dan Akbar 2009:99) yaitu:

1. Sumber data berada dalam situasi yang wajar, tidak dimanipulasi oleh angket dan tidak dibuat-buat sebagai kelompok eksperimen.
2. Laporrannya sangat deskriptif.
3. Mengutamakan proses dan produk.

4. Peneliti sebagai instrument penelitian
5. Mencari makna, dipandang dari pikiran dan perasaan responden.
6. Mementingkan data langsung, karena itu pengumpulan datanya mengutamakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Dalam penelitian ini landasan teori diperlukan tetapi bukan digunakan sebagai landasan untuk menentukan kriteria pengukuran terhadap gejala yang diamati (Fathoni, 2011:97).

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif karena untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara terperinci bagaimana sifat serta hubungan antara fenomena sosial tertentu. Tidak terlepas dari pokok permasalahan dalam penelitian, maka tujuan dilakukannya penelitian deskripsi ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas akuntabilitas dalam revitalisasi pengelolaan Pasar SMEP oleh Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Untuk penyelesaian masalah ini diperlukannya sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan konseptual. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian kualitatif memahami realitas sosial sesungguhnya yang terjadi pada obyek yang akan diteliti.

## **B. Fokus Penelitian**

Pada penelitian kualitatif, fokus penelitian memegang peran sangat penting. Fokus penelitian menentukan batasan dalam sebuah penelitian, sehingga masalah yang diteliti tidak melebar. Penelitian kualitatif ingin mengetahui cerita para responden dan fenomena yang diteliti, artinya dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian (Purhantara, 2010:10).

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti ingin memfokuskan penelitian pada sejauh mana tingkat pertanggungjawaban dalam revitalisasi pengelolaan Pasar SMEP oleh Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, dengan indikator dimensi-dimensi akuntabilitas :

### **1 Akuntabilitas Kejujuran**

Terkait dengan penghindaran Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dengan memeriksa dan menyeimbangkan peraturan kewenangan dalam revitalisasi Pasar SMEP.

### **2 Akuntabilitas Hukum**

Terkait dengan penerapan prinsip transparansi Bidang Bina Pasar dalam dengan mematuhi Undang Undang dalam pengelolaan dana publik dan berpijak pada aturan yang ditetapkan.

Kesanggupan untuk mentaati segala peraturan perundang undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar

larangan yang ditentukan selama revitalisasi Pasar SMEP Kota Bandar Lampung.

### **3 Akuntabilitas Proses**

Terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan pelelangan dan menunjukan PT Prabu Artha sebagai pihak pengembang revitalisasi Pasar SMEP.

Terkait dengan pemberian pelayanan publik yang cepat, *responsive* dan murah biaya.

### **4 Akuntabilitas Program**

Terkait pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah dipertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal dalam revitalisasi Pasar SMEP.

### **5 Akuntabilitas Kebijakan**

Mengacu pada pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun daerah dalam revitalisasi Pasar SMEP yang diserahkan kepadanya dengan sebaik baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi peneitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi itu sangat menunjang untuk sapat

memberikan informasi yang valid. Lokasi penelitian yang baik adalah lokasi/obyek penelitian yang sesuai dengan obyek permasalahannya dan merupakan daerah informasi (Subagiyo, 2006:35). Lokasi penelitian diambil dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja.

Argumen peneliti dalam penentuan lokasi secara sengaja karena dalam pertimbangan pemilihan lokasi ini mengambil lokasi di wilayah kerja Pasar SMEP Kota Bandar Lampung, terutama wilayah kerja pasar yang sudah menjadi pembongkaran bangunan. Selain itu penelitian juga dilakukan kepada para pedagang pasar sekitar wilayah kerja pasar yang sudah menjadi pembongkaran bangunan. Sehingga menurut peneliti di wilayah kerja pasar SMEP menarik untuk dilakukannya penelitian mengenai akuntabilitas dalam revitalisasi pengelolaan Pasar SMEP oleh Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

#### **D. Informan**

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimal (Fathoni, 2011:215). Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *snowball*, yang merupakan teknik pengambilan informan dengan bantuan *key-informan*, dan dari *key informan* inilah akan berkembang sesuai petunjuknya. Dalam hal ini peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk dijadikan informan (Subagyo, 2006:31).

Berdasarkan teknik *snowball* ini dipilih Dinas Perdagangan yang akan menjadi informan untuk selanjutnya memberikan petunjuk siapa informan dari pihak PT Prabu Artha, Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandar Lampung, selanjutnya anggota DPRD Komisi II, LSM, kemudian pihak yang ditargetkan dalam kebijakan tersebut yaitu pedagang pasar.

1. Drs. Edwar selaku Kabid Bina Pasar Dinas Perdagangan
2. Desma selaku asisten wakil pengembang proyek PT. Prabu Artha
3. Grafiel Mamesah selaku Sekretaris Komisi II DPRD Bandar Lampung
4. Suyono selaku ketua persatuan pedagang Pasar SMEP
5. Ali selaku aktivis LSM

## **E. Jenis Data**

Data dapat dikategorikan dan diperbandingkan untuk menanyakan pertanyaan apa itu unit analisis, apa itu level analisis, berapa banyak data populasi dan sampel yang diambil dari populasi terbesar, apakah data *cross-sectional/longitudinal*, dan apa itu data kualitatif dan kuantitatif (Barakso, 2014: 86).

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, kemudian diamati, dan dicatat. Bila dikaitkan dengan peneliti yang akan penulis lakukan maka data primer merupakan data utama yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara, baik terstruktur ataupun mendalam (*in depth interview*), serta observasi langsung oleh peneliti (Kurniawan, 2012: 19).



Data primer pada penelitian ini adalah data yang dihasilkan dari Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, pihak PT. Prabu Artha, anggota DPRD Komisi II, pedagang pasar SMEP Kota Bandar Lampung, dan Ali aktivis LSM.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data diperoleh dari buku, jurnal, majalah, dan literatur yang relevan dengan tujuan penelitian. Jika dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis maka data sekunder yang dilakukan adalah berupa dokumen yang memuat informasi penelitian (Kurniawan, 2012: 20).

Pada penelitian ini data sekunder yang peneliti dapatkan adalah dokumen-dokumen seperti Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Prabu Artha Developer, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri, Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah, catatan-catatan, laporan historis dan dokumentasi foto-foto kegiatan.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif ini, pengumpulan data peneliti menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya. Observasi juga merupakan aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau obyek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian (Shapiro, 2014: 25-26).

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipatif tipe partisipasi pasif (*passive participation*). Dalam hal ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi langsung memang membuat peneliti membenamkan diri di dalam masalah yang sedang diteliti. Pengamatan langsung dalam penelitian ini sangat bermanfaat untuk membuat banyak deskripsi terkait dengan penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung terhadap informan dengan menggunakan model ‘pembuktian’ oleh seorang pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui berbagai hal yang belum terungkap oleh informan seperti, motivasi, kepercayaan, perilaku, perasaan mengenai suatu topik tertentu sehingga diperoleh suatu data untuk analisis. Terdapat dua jenis wawancara itu adalah wawancara terstruktur dan wawancara semi terstruktur (Bryman, 2012: 469).

Wawancara yang telah dilakukan peneliti meliputi wawancara terstruktur (*structured interview*) yakni peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Peran pewawancara dengan informan haruslah pewawancara yang lebih aktif, sehingga kita dapat mendapatkan esensi serta hasil tujuan wawancara (Halperin dan Heath, 2012: 253-254). Wawancara dilakukan berdasarkan fokus masalah penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah dan tidak menyimpang. Berikut ini adalah wawancara bersama informan:

- a. Drs. Edwar sebagai Kepala Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung (7 Maret 2017 Pukul 08.31 WIB)
- b. Desma selaku asisten wakil pengembang proyek PT. Prabu Artha (15 Maret 2017 pukul 10.32 WIB)
- c. Grafieldy Mamesah selaku Sekretaris Komisi II DPRD Bandar Lampung (17 Maret 2017 pukul 11.40 WIB)

- d. Suyono selaku salah satu pedagang Pasar SMEP (9 Maret 2017 pukul 09.47 WIB)
- e. Ali selaku aktivis LSM (8 Mei 2017 pukul 15.05 WIB)

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran (Basrowi dan Suwandi, 2008 : 58 ). Melalui studi dokumentasi peneliti mengumpulkan data melalui dokumen baik yang bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.

Dokumentasi bisa disebut sebagai pelengkap teknik observasi dan wawancara karena melalui dokumen-dokumen yang ada peneliti dapat mengumpulkan data lebih banyak lagi. Pada penelitian ini dokumentasi yang peneliti dapatkan adalah dokumen-dokumen seperti Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Prabu Artha Developer yang peneliti dapatkan dari Komisi II DPRD Kota Bnadar Lampung, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri peneliti dapatkan dari Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yang peneliti dapatkan dari Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite

Percepatan Penyediaan Infrastruktur yang peneliti dapatkan dari internet, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah peneliti dapatkan dari internet.

Selain itu peneliti juga melengkapi dokumen untuk penelitian ini seperti liputan berita dimuat lampung.tribunnews.com edisi Minggu 9 Oktober 2016 20:15 diakses pada 10 Desember pukul 22.05, liputan berita lampung.tribunnews.com edisi Senin 15 September 2014 14:56 diakses pada 10 Desember 2016 pukul 11.00, liputan berita haluanlampung.com edisi 30 Juli 2015 diakses pada tanggal 16 Desember pukul 14.07, liputan berita dimuat Lampost.co edisi Jumat 5 September 2014 diakses pada tanggal 15 Desember 2017 pukul 19.26, liputan berita bandarlampungnews.com edisi 5 Agustus 2015 diakses pada tanggal 13 Desember 2016 pukul 20.09.

### **G. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur, dan mengaplikasikan, menimbang dan menyaring data berarti benar-benar memilih secara hati-hati data yang tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, mengaplikasikan berarti mengelompokkan, menyusun, dan menggolongkan menjadi satu kemudian dapat dibuat menjadi klarifikasi dan kategori. Data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis serta diolah secara logis menurut rancangan

penelitian yang telah ditetapkan. Pengolahan data diarahkan untuk member argumentasi atau penjelasan yang diajukan penelitian berdasarkan data atau fakta yang diperoleh (Kurniawan, 2012: 31).

Setelah mendapatkan sejumlah data dari lapangan, maka peneliti dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Seleksi Data**

Pada tahap ini pemilihan data yang valid dan paling erat hubungannya dengan inti permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak relevan harus disingkirkan. Hasil wawancara bersama pihak Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung, PT. Prabu Artha Developer dan pedagang Pasar SMEP yang tidak relevan dengan data yang diinginkan peneliti harus dibuang.

### **2. Klasifikasi Data**

Data yang sudah dipilih kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori tertentu sesuai dengan item pertanyaan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian untuk mempermudah dalam pengelolaan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan EYD.

### **3. Mengumpulkan Hasil**

Hasil penelitian dari data yang terkumpul kemudian disusun, setelah memulai analisis dan menghubungkannya dengan teori-teori yang

relevan dengan penelitian ini. Data yang sudah dikumpulkan oleh penulis dianalisis berdasarkan kebutuhan penelitian yang kemudian diaitkan dengan teori yang digunakan sesuai dengan masalah penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian.

## **H. Teknik Analisis Data**

Data kualitatif merupakan data primer yang diperoleh dari proses antara peneliti dengan partisipan (informan). Analisis data kualitatif banyak dipengaruhi oleh topik riset, waktu, pefensi peneliti, dana dan perlengkapan (Firadus, 2012:40). Dengan demikian analisis data kualitatif dimulai dengan mempersiapkan format yang akan digunakan dalam analisis. Format ini dapat berupa catatan selama proses pengamatan, format isian. Format ini digunakan untuk menuliskan respon dan kondisi yang diamati.

Data kualitatif dapat dibuktikan secara sistematis serta logis, meskipun dengan cara berbeda dari analisis kuantitatif atau statistik. Sering waktu analisis data kualitatif telah menjadi lebih eksplisit (Neuman, 2007: 328). Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan, yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil

catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti.

Peneliti mewawancarai informan yaitu Kepala Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, asisten wakil pengembang proyek PT. Prabu Artha, Sekertaris Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung, dan pedagang Pasar SMEP menggunakan pertanyaan yang sama tiap kriteria informan untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang tidak sesuai dengan fokus penelitian

## **2. Display Data**

Display data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif.

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis.

## **3. Verifikasi Data**

Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas



eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektivitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian. Proses reduksi data dan penyajian data telah dilakukan, peneliti mengungkapkan kesimpulan pada penelitian ini. Peneliti menarik kesimpulan bahwa Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar SMEP Kota Bandar Lampung tidak karena kriteria-kriteria akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan belum sepenuhnya terpenuhi.

Proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian. Data dianalisis dan diperiksa keabsahannya untuk disimpulkan.

#### **4. Triangulasi Data**

Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui tiga cara yaitu pengecekan kredibilitas, dependibilitas, dan konfirmabilitas (Miles dan Huberman, 1993:73). Teknik keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data

yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang sah. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan yang sesuai.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang diperkuat oleh observasi yang memiliki kesamaan informasi.

#### **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Singkat Pasar SMEP**

Pasar SMEP merupakan salah satu pasar tradisional yang sudah dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung maupun masyarakat luar Kota Bandar Lampung. Sebelumnya lokasi Pasar SMEP ini merupakan sebuah sekolah yaitu Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP). Adanya sebuah sekolah maka membuka peluang juga kepada pedagang untuk mencari nafkah. Pedagang pun mulai berdagang disekitaran sekolah tersebut. Berjalannya waktu semakin banyak pula pedagang yang berjualan di lokasi tersebut. Melihat fenomena tersebut maka pemerintah membuat sebuah kebijakan yaitu menjadikan lokasi tersebut menjadi sebuah pasar tradisional dengan nama Pasar SMEP.

Bangunan Pasar SMEP merupakan bangunan milik Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berdiri di atas tanah seluas 7.074 M<sup>2</sup> dengan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 03/KTi atas nama Pemerintah kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung nomor : 176/HGB/BPN/1993 tertanggal 16 Februari 1993. Pasar ini dibangun sejak tahun 2003 oleh pihak pengembang

yaitu PT. Teguh Jaya Lestari melalui Surat Perjanjian Nomor 06 Tahun 2003, sebagai transaksi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adapun fasilitas pendukung dari Pasar SMEP ialah:

- a. Kantor UPT pasar
- b. Musholla
- c. Kantor Satpam
- d. KM/WC Umum
- e. TPS Sampah

## **B. Letak Pasar SMEP**

Letak Pasar SMEP ini berada di pusat Kota Tanjung Karang (Bandar Lampung) yaitu di Jalan Tamin Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Teluk Betuk Pusat. Lokasi ini sangat strategis dan dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai sudut kota. Oleh karena itu, Pasar SMEP ini dilewati oleh seluruh trayek angkutan kota. Adapun batas-batas dari Unit Pasar SMEP adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Imam Bonjol
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bukit Tinggi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Batu Sangkar
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kartini

## **C. Komposisi Pedagang**

Berdasarkan jenis barang dagangannya, pedagang di Pasar Smep terbagi dalam enam kelompok. Pedagang tersebut antara lain terdiri dari : pedagang pakaian, pedagang emas, pedagang kosmetik, pedagang sepatu, pedagang makanan, pedagang bahan pakaian dan pedagang lain-lain (pedagang kelontongan, boneka, kerajinan dan lain-lain). Berdasarkan klasifikasi tempat

berdagang maka pedagang Pasar SMEP berdasarkan klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel.2 Jumlah Pedagang Pasar SMEP Berdasarkan Klasifikasinya**

No	Jenis Berdagang	Jumlah
1	Toko Kios	220
2	Pedagang Kaki Lima	300
Total		520

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data tersebut, maka jumlah pedagang Pasar SmeP secara keseluruhan adalah 520 pedagang.

#### **D. Gambaran Umum Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan**

Berdasarkan keputusan Pemerintah Kota Bandar Lampung dimana telah dihapusnya dua dinas dan mengubahnya menjadi perusahaan daerah (PD), kedua instansi yang dihapus tersebut adalah dinas pengelolaan pasar serta dinas kebersihan dan pertamanan. Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh walikota Herman HN dan ketua DPRD beserta wakil, melalui rapat paripurna tanggal 13 Oktober 2016. Penghapusan tersebut mengikuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah

Perusahaan Daerah Pasar diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung. Perusahaan Daerah Pasar punya dasar hukum untuk melakukan pengelolaan pasar di Kota Bandar Lampung Beberapa urusan

Dinas Pengelolaan Pasar terdahulu diwariskan kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandar Lampung seperti terkait penataan pasar tradisional.

Berkaitan dengan belum operasionalnya pelaksanaan tugas dan fungsi, dikarenakan baru dibentuknya Perusahaan Daerah Pasar sehingga penataan pasar tradisional yang selama ini pasar-pasar yang dikelola pihak ketiga selalu menimbulkan masalah, seperti Pasar SMEP dilimpahkan kepada Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan yang diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Bandar Lampung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

#### **Susunan Bidang Bina Pasar :**

- 1) Bidang Bina Pasar dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- 2) Bidang Bina Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perdagangan meliputi bina usaha, permodalan, sarana dan logistic, bina pasar dan informasi;
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Bina Pasar mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan program, perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Pasar meliputi pembangunan sarana prasarana dan pembinaan pedagang pasar;
  - b. Penyusunan rencana pengembangan pasar tradisional dan pasar modern dan pengawasan perdagangan retail;

- c. Pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian rekomendasi terhadap pembangunan dan pengembangan pasar modern;
  - d. Pengawasan dan fasilitasi terhadap harga pasar dan distribusi kebutuhan bahan pokok pada pasar tradisional;
  - e. Pelaksanaan sebagai upaya peningkatan akses pasar sebagai pusat sarana distribusi perdagangan;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Bina Pasar dibantu oleh:
- a. Seksi Bina Usaha dan Permodalan;
  - b. Seksi Sarana dan Logistik;
  - c. Seksi Bina Pasar dan Informasi.
- 5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Bina Usaha dan Permodalan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan usaha dan permodalan;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka meningkatkan daya saing pedagang pasar rakyat;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan usaha dan permodalan dengan pola kemitraan;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan usaha pedagang tradisional dan pasar modern dengan pola kemitraan;

- e. Menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi dan sosialisasi dalam rangka peningkatan usaha dan permodalan;
- f. Menyiapkan bahan sosialisasi dalam rangka upaya peningkatan pengembangan usaha peningkatan permodalan dan kemitraan usaha dan pasar;
- g. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Sarana dan Logistik mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan sarana dan logistik;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan san/atau revitalisasi fisik sarana distribusi perdagangan;
- c. Menyiapkan dan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana pasar;
- d. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi standarisasi pasar rakyat;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan perencanaan, pengolahan dan evaluasi kegiatan operasi pasar atau pasar murah;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Bina Pasar dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dalam peningkatan pengembangan pasar tradisional dan informasi;



- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis persediaan bahan pokok pada pasar tradisional;
- c. Melaksanakan pengawasan, sosialisasi, dan evaluasi kebijakan dan/atau regulasi pengelolaan pasar tradisional;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis tata siaga distribusi skala kota, pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kerjasama logistic pada pasar tradisional;
- e. Menyiapkan bahan sosialisasi dan/atau kampanye gerakan pasar rakyat sebagai pusat distribusi perdagangan;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik simpulan bahwa Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung tidak akuntabel dalam revitalisasi pengelolaan Pasar SMEP Kota Bandar Lampung karena pembangunan pasar tidak terlaksana dan tidak sesuai perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Prabu Artha. Hal tersebut dapat disimpulkan sesuai dengan masing-masing dimensi akuntabilitas sebagai berikut:

1. Aspek akuntabilitas kejujuran, Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan selaku dilimpahkannya tugas dari Dinas Pengelolaan Pasar dalam pembangunan dan penataan kembali Pasar SMEP menjalankan tugas, pokok, dan fungsi sudah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh walikota namun belum berdasarkan pada prinsip tanggungugat maupun prinsip tanggungjawab. Hal tersebut karena terjadi keterlambatan pembangunan, serta dalam penerapannya terdapat ketidakpatuhan pihak pemerintah maupun pengembang dalam peraturan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

2. Apek akuntabilitas hukum, berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Prabu Artha tentang pembangunan dan penataan kembali Pasar SMEP Nomor 20/PK/HK/2013 Nomor 888/PAD/VII/2013, dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Jangka waktu pembangunan yang direncanakan 12 bulan untuk *basement* dan 24 bulan untuk lanti I hingga lantai IV, namun hingga saat ini belum terealisasi diakibatkan pihak PT. Prabu Artha beralasan kesulitan mendapatkan dana untuk pembangunan Pasar SMEP. Selain itu, PT. Prabu Artha juga tidak menerapkan sistem transparansi dalam penggunaan dana serta keterbukaan informasi untuk masyarakat mengenai pembangunan Pasar SMEP.
3. Akuntabilitas proses, kebijakan pembangunan dan penataan kembali Pasar SMEP ini dalam implementasinya tidak dilaksanakan secara baik oleh para *stakeholder*/pengambil keputusan. Dalam proses pelelangan kontraktor pembangunan dan penataan kembali Pasar SMEP yang menetapkan PT. Prabu Artha sebagai pemenang tender terlihat tidak *transparent*. Terdapat kelalaian yang dilakukan PT. Prabu Artha karena ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan dengan isi dari perjanjian kerjasama pembangunan Pasar SMEP ini, namun pihak pemerintah kota tidak mengambil langkah hukum apapun untuk menuntut PT. Prabu Artha Developer. Adanya perjanjian tambahan (*adendum*) yang sudah dilakukan 2 kali, perihal keterlambatan waktu pembangunan yang menyatakan bahwa jangka waktu tersebut membuktikan bahwa prosedur

yang dijalankan belum menunjukkan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

4. Akuntabilitas program, alternatif program yang telah ditetapkan untuk mendukung pembangunan dan penataan kembali Pasar SMEP dengan menyediakan tempat penampungan sementara (TPS) untuk dijadikan lapak berjualan yang bertempat disamping eks penjara lama Lebak Budi atau di Jalan Imam Bonjol yang dikhususkan bagi pedagang ruko, diterusan Jalan Bukit Tinggi (tanah milik Bumi Waras) yang dikhususkan bagi pedagang basah seperti sayuran, ikan, dan pedagang daging, serta di Jalan Batu Sangkar yang dikhususkan bagi pedagang sembako atau bahan kering. Namun hal tersebut belum menunjukkan program yang dapat mendukung penyelesaian keterlambatan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
5. Akuntabilitas kebijakan, kebijakan ini dinilai tidak memenuhi kebutuhan dan aspirasi bagi masyarakat. Pihak aparat dan investor juga belum melakukan pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut dinilai karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah pelaksana pembangunan dan penataan kembali Pasar SMEP. Masyarakat juga belum mendapatkan informasi kejelasan mengenai kelanjutan pembanguan serta penyelesaian pembangunan Pasar SMEP.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah maupun pengembang harus menaati peraturan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Prabu Artha tentang Pembangunan dan Penataan Kembali Pasar SMEP. Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan harus membudayakan kerja disiplin, meningkatkan etos kerja, bertanggungjawab sepenuhnya dengan perannya sesuai tugas, pokok, dan fungsi.
2. Pemerintah Kota Bandar Lampung dan PT. Prabu Artha harus terbuka dalam segala informasi terkait pembangunan Pasar SMEP kepada masyarakat. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung juga bertindak tegas terhadap PT. Prabu Artha Developer karena sejauh ini telah lalai dalam melaksanakan isi perjanjian yang menyebabkan banyak pedagang Pasar SMEP merugi. Sikap tegas yang perlu diambil Pemerintah Kota Bandar Lampung bisa dengan berupa pemutusan perjanjian dan ganti rugi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Serta mencari pengembang baru yang lebih serius dalam melaksanakan pembangunan.
3. Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam melakukan kerjasama dengan pihak kedua harus memperhatikan rekam jejak perusahaan tersebut untuk meminimalisir kegagalan pencapaian tertentu. Mengenai

keterlambatan pembangunan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, maka sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan perlu melakukan tindak lanjut mengenai standar capaian, menilai pelaksanaan dan memperbaiki permasalahan selama pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan serta memperoleh pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

4. Untuk menunjang program yang dapat mendukung penyelesaian keterlambatan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, sebaiknya Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung berinisiatif membuat inovasi-inovasi prosedur yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan dan harus mempunyai skala prioritas apa saja yang harus dibenahi dan diperbaiki selama pembangunan terhenti agar permasalahan pembangunan pasar dapat berkurang. Sehingga Dinas Pasar mempunyai target dalam pembangunan pasar dan tidak hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah, serta mampu memberikan pelayanan yang prima, memperhatikan kenyamanan, keindahan serta keamanan bagi masyarakat dan pedagang.
5. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Prabu Artha tentang Pembangunan dan Penataan Kembali Pasar SMEP yang dalam pelaksanaan pembangunan pasar terdapat kekurangan, maka secepatnya harus segera dievaluasi dan diperbaiki agar tujuan kebijakan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Barakso, Maryam. 2014. *Understanding Political Science Research Methods: The Challenge of Inference*. Newyork: Routledge
- BasrowidanSuwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods*. New York. Oxford University Press
- Bungin, Burhan. 2012 *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press
- Dunn, Wiliiam N.,2003. *Analisis Kebijakan Publlik*. Yogyakarta: GadjahMadda University Press
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Halperin, Sandra and Heath, Oliver.2012. *Political Research: Methods and Practical Skills*. New York: Oxford University Press
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Managemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kurniawan, Benny.2012. *Metode Penelitian* .Tangerang: Jelajah Nusa
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta
- Miles, M. B. dan Hubberman.1993. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Moeljarto. 1995. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Neuman, W Laurence. 2007. *Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education Limited.
- Nugroho, Riant. 2004. *KebijakanPublik: Formulasi, Implementasi, danEvaluasi*. Jakarta: Media ElexKomputindo

- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* .Yogyakarta:Graha Ilmu
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance*. Bandung: CV. MandarMaju
- Sedarmayanti.2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. MandarMaju
- Shapiro, Ian. 2014. *Problems and Methods in the Study Politics*. Cambridge: Cambridge University Press
- Silaen, Sofar. 2013. *Metodelogi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: In Media
- Subagiyo, P. Joko. 2006. *Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek* .Jakarta: Rineka Cipta
- Sukirno, S. 2003. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja GrafindoPersada
- Surya, Indradan Ivan Yustiavandana.2008. *Penerapan Good Corporate Governance*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Susanto. 2009. *Memacu Infrastruktur Ditengah Krisis. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian*. Pustaka Bisnis Indonesia
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta:RinekaCipta.
- Teguh, Afriyadi.. 2004. *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*. Jakarta: UniversitasTrisakti
- Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Ke 9 Jilid 1*. Jakarta: Erlangga
- Ulrich, Karl T. and Eppinger Steven D.2012. *Product Design and Development* New York: McGraw-Hill International.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar.2009. *Metode Penelitian Sosial* .Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia

### **Jurnal:**

- Mardihantoro dan Metty .2016. *Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung*. No. 43
- Nawawi, Juanda. 2012. *Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance*. Vol. 1 No. 3



## **Dokumen:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang Infrastruktur

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Prabu Artha Developer

The World Bank (1994) tentang Infrastruktur

## **Skripsi:**

Ariwibowo, Bramantya. 2015. *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung Dengan PT Prabu Artha Developer (Studi Pada Perjanjian Pembangunan dan Penataan Kembali Pasar SMEP Kota Bandar Lampung)*. Lampung. Universitas Lampung

Hutagaol, Jona. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Desa Riau Periang Kecamatan Pobian, Kabupaten Lampung Selatan)*. Lampung. Universitas Lampung

Kurniaty, Novita. 2014. *Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar SMEP Bandar Lampung*. Lampung. Universitas Lampung

## **SumberLain :**

<http://lampung.tribunnews.com/2016/10/09/pasar-smep-dibuat-9-lantai-kadis-pasar-katanya-proses-pembangunan-selama-3-tahun>

<http://lampung.tribunnews.com/2014/09/15/rp-10-miliar-total-setoran-pedagang-smep-ke-alay>

<http://www.haluanlampung.com/index.php/siger/7265-pt-prabu-artakembali-ditunjuk-bangun-pasar-smep>

<http://www.bandarlampungnews.com/index.php?k=politik&i=20876-Soal%20Pasar%20Smep,%20Kebijakan%20Pemkot%20Dinilai%20Blunder>

<http://lampost.co/berita/pemkot-bandarlampung-pertahankan-kontraktor-pasar-smep->